

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Arif Sidharta, 2010, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Assiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Raja Wali Pers.
- C.S.T. Kansil, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fajar Laksono, 2006, *Kontroversi Undang Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta, UII Press.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media.
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Khelda dan Rais, 2016, *HTN Indonesia*, Wacana Media Jakarta.
- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Marwan Mas, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Pandu Dewanata, 2011, *Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden : Sebuah Anomali dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*.
- Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, 1989, *Perundang-undangan dan Yurisprudeni*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Soeria Atmaja, Arifin, 2005, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta, UI Pers.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Suparman Marzuki, 2004, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga.
- Tanto Lailam, 2017, *Modul Praktek Penyusunan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.
- Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Jurnal Penelitian :**

Algi Aulalangi, 2018, *Penandatanganan Presiden Terhadap Undang-Undang (tinjau pasal 20 ayat 5 UUD 1945)*, Skripsi UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Skripsi Universitas HKBP Medan, Fakultas Hukum.

Helmi Chandra, 2016, Kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Tanpa Tanda Tangan Presiden, *Jurnal PPKN & Hukum*, Vol. 11, No.2.

M. Rezha Fahlevie, 2014. Thesis Pasca Sarjana: Pengesahan Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden, Sumatera Barat, Universitas Andalas: Padang.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Prolegnas tahun 2005 – 2009.

Rahayu Prasetyaningsih, 2017, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Universitas Padjajaran.

Winda Wijayanti, 2013, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Internet :**

[https://puskkpa.lapan.go.id/files\\_arsip/Soegiyono Pentingnya Harmonisasi 2015.pdf](https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmonisasi_2015.pdf).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id7834>.

<http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4MIH024323.pdf>.

Kongres advokat indonesia, <https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-uji-uu-tanpa-tanda-tangan-presiden-lt5a8eade16445/>.

